

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ANISYA DWI SUKMA AGSA

NIM. 21060050/2021

**DEPERTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA

Nama : Anisya Dwi Sukma Agsa

NIM/TM : 21060050/2021

Departemen : Ilmu Ekonomi

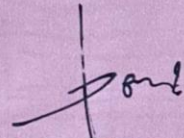
Keahlian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,



Dr. Novva Zulva Riani, S.E., M.Si
NIP. 1971104 200501 2 001



Mike Triani, S.E., M.M.
NIP. 19840129 200912 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Anisya Dwi Sukma Agsa

NIM/TM : 21060050/2021

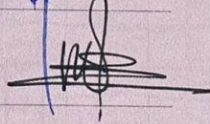
Departemen : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Mike Triani, S.E., M.M.	1. 
2	Anggota	: Dr. Muhammad Irfan, S.E., M.Si.	2. 
3	Anggota	: Muhammad Anshari, S.E., M.E.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisya Dwi Sukma Agsa
NIM/Tahun Masuk : 21060050/2021
Tempat, Tanggal Lahir : Perintis PTPN VI OPHIR, 10 September 2002
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Padang Lawas, Dusun 5
No.HP/Telepon : 082319641788
Judul Skripsi : Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Kepala Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Oktober 2025



Anisya Dwi Sukma Agsa
NIM: 21060050

ABSTRAK

Anisya Dwi Sukma Agsa (21060050) 2025. Faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibuk Mike Triani, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017-2023 dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini ditetapkan yaitu indeks pembangunan manusia, dan variabel bebas yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan cross section 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dan times series dari tahun 2017-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka semakin rendah pula capaian pembangunan manusianya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti perubahan dalam tingkat pengangguran tidak memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan maupun penurunan indeks pembangunan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum tentu disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi secara simultan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Data Panel*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik, skripsi ini berjudul **“Faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara”**.

Shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada nabi junjungan umat manusia seluruh alam Nabi besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti penulis rasakan pada saat sekarang ini. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kesulitan tersebut telah dapat diatasi. Semua tidak terlepas dari do'a dan dukungan yang diberikan oleh segenap keluarga besar. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, S.E., M.Si, selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, atas segala kebijakan, arahan, dan semangat yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis.
2. Ibu Mike Triani, S.E., M.M., Bapak Dr. Joan Marta, S.E., M.Si., serta Bapak Dr. Doni Satria, S.E., M.Si., yang dengan sabar dan penuh ketelitian telah

membimbing penulis melalui berbagai proses akademik. Terima kasih atas ilmu, motivasi, kritik, dan saran yang luar biasa, yang menjadikan skripsi ini jauh lebih bermakna dari sekadar kewajiban akademik.

3. Bapak Dr. Muhammad Irfan, S.E., M.Si. dosen penguji 1 yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Anshari, S.E., M.E. dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada orang tua tercinta, ayah M. Syahrin Pane dan ibu Gustimar, terimakasih sudah memberikan modal mental hingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih sudah mendidik diri ini hingga bisa berjalan sejauh ini. Terima kasih atas setiap semangat yang diberikan, pelukan hangat dalam keheningan, dan kepercayaan yang tak pernah padam.
7. Teristimewa kepada kakak pertama Apridhearika Agsya, S.M., kakak kedua Apt. Dinda Yossy Augustia, S.Farm. yang selalu memberi dukungan, moral, semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis Ilmu Ekonomi 2021 yang selalu memberikan semangat dan semangat juga buat teman-teman semua yang sedang berjuang.

9. Kepada teman-teman penulis, teman yang sudah mengisi kekosongan, Syavira, Hana, Dini, Dian, Sukma, dan Arindy terimakasih, dan teman teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada teman Nini, Ani, Murni, Dila, Aii, Pinduk, Vivin, Rahma termakasih sudah memberikan dukungan mental dan hiburan kepada penulis,
11. Kepada Aisyah Mail Nexsi, S.Pd. termakasih sudah memberikan dukungan yang besar, mental dan hiburan kepada penulis.

Peneliti telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang peneliti miliki, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun penyajinya. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi peneliti dan pembaca.

Padang, Oktober 2025
Peneliti

Anisya Dwi Sukma Agsa
(21060050)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	24
1. Pembangunan Manusia	24
2. Tingkat Kemiskinan	28
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	31
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual	43
D. Hipotesis.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Definisi Operasional.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Deskriptif.....	58

1. Deskriptif Variabel.....	58
2. Deskriptif Statistik	88
B. Analisis Induktif.....	90
1. Pemilihan Model Regresi.....	91
2. Estimasi Hasil Fixed Effect.....	93
3. Uji Asumsi Klasik.....	97
4. Uji Hipotesis	103
C. Pembahasan Hasil Penelitian	108
1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	108
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia	111
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	59
Tabel 4.2	Tingkat Kemiskinan	62
Tabel 4.3	Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka	72
Tabel 4.4	Analisis Pertumbuhan Ekonomi.....	80
Tabel 4.5	Hasil Analisis Deskriptif	88
Tabel 4.6	Uji Chow	92
Tabel 4.7	Hasil Uji Hausman	93
Tabel 4.8	Hasil Uji Fixed effect Model (FEM).....	94
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas.....	98
Tabel 4.10	Uji Auto Korelasi	99
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedasitas	100
Tabel 4.12	Hasil Uji Robust.....	69
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial (Uji-t)	104
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan.....	106
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Detreminasi (R2).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Utara	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 3.1 Stata Data Panel Deskriptif	58
Gambar 4.1 Kuadran TK dan IPM.....	58
Gambar 5.1 Kuadran TPT dan IPM.....	67
Gambar 6.1 Kuadran PE dan IPM.....	75

BAB I PENDAHULUAN

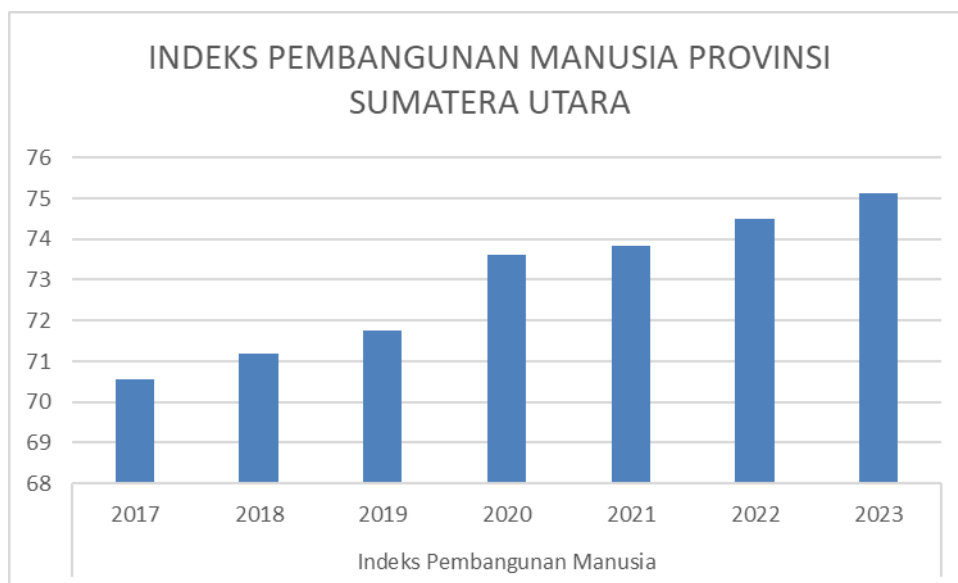
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan manusia saat ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai tingkat kemajuan suatu negara, terutama dalam era globalisasi yang menuntut sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Salah satu alat ukur yang digunakan secara luas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menilai kualitas hidup melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup (kesejahteraan). Menurut Todaro dan Smith (2003) menyatakan IPM dalam periode tertentu sering kali dikaitkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak serius dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Sejalan dengan hal itu, Michael P. Todaro, (2003) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut kekurangan penghasilan, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti gizi, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dimana terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan manusia yaitu Chakrabarti & Dhar, (2017) yang dikutip dari buku Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin melebar, meningkatkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menekankan bahwa ketimpangan yang tinggi

dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi dan ketegangan sosial, yang pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurut Apriyanti & Rospida, (2025) IPM bukan hanya ukuran statistika, melainkan cerminan dari peluang kehidupan yang tersedia bagi warga negara. Hal ini berlaku untuk negara berkembang seperti Indonesia dan khususnya Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di pulau Sumatera sekitar 60.795.669 jiwa. Dengan memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masing-masing provinsi di Kawasan pulau Sumatera sebagai berikut : Kepulauan Riau (79,08), Sumatera Barat (75,64), Sumatera Utara (75,13), Riau (74,95), Aceh (74,70), Bengkulu (74,30), Kepulauan Bangka Belitung (74,09), Jambi (73,73), Sumatera Selatan (73,18), Lampung (72,48). Sumatera Utara menempati peringkat ke-3 (dihitung dari tertinggi ke terendah) di antara provinsi-provinsi kawasan Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang pertama dan Sumatera Barat kedua (BPS 2023).



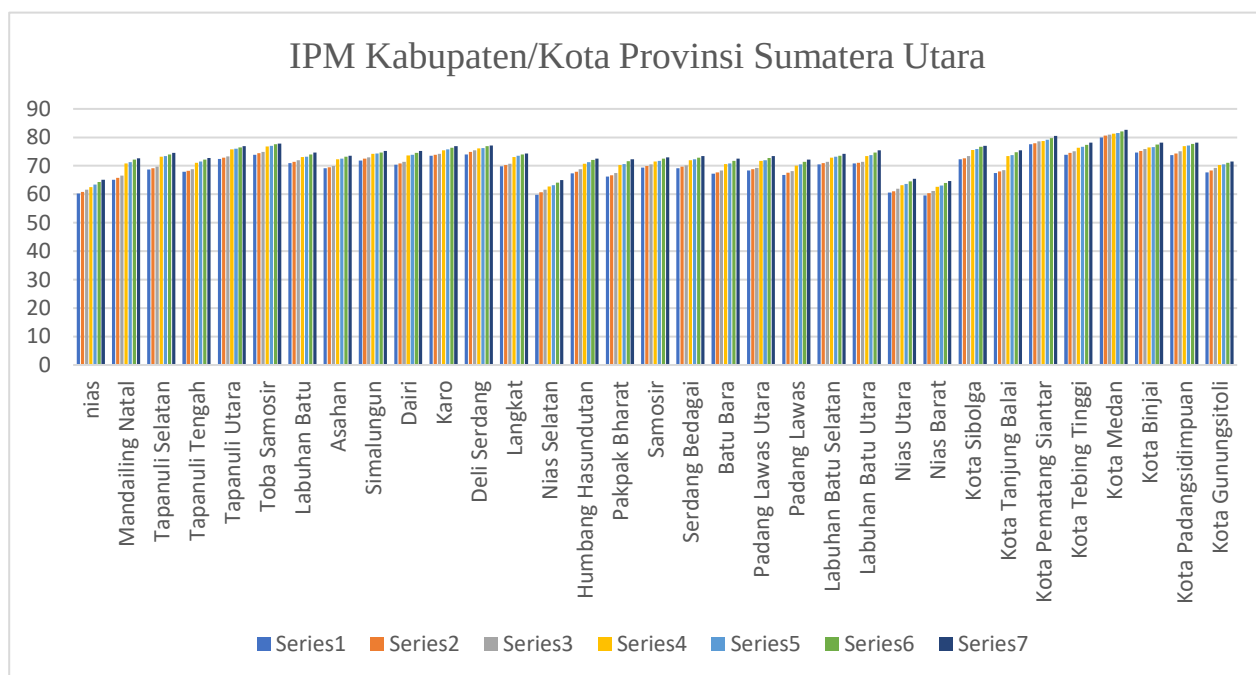
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa tidak adanya fluktuasi IPM Provinsi Sumatera Utara. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2023, nilai IPM terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan gambar yang ada. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara tercatat pada nilai 70,57. Angka ini menjadi indikator awal yang menggambarkan situasi pembangunan manusia di provinsi tersebut pada tahun yang bersangkutan. Lalu pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara mencapai 75,13, yang menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini mencerminkan adanya tren positif yang terus berlanjut hingga tahun terakhir data yang tersedia. Setiap tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten tanpa penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun

2019 dan 2020, ketika IPM naik dari 71,74 menjadi 73,62. Hal ini mengindikasikan adanya akselerasi dalam pembangunan manusia pada periode tersebut. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan di berbagai aspek pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara. Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan setiap tahun, dengan tren pertumbuhan yang positif dan stabil selama periode 2017 hingga 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 74,91. Pencapaian ini menempatkan Sumatera Utara pada peringkat ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara berada pada level menengah, masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi dengan IPM tinggi, tetapi juga telah melampaui sebagian besar provinsi lainnya. Naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tentu disebabkan oleh berbagai faktor.



Gambar 1.2 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara

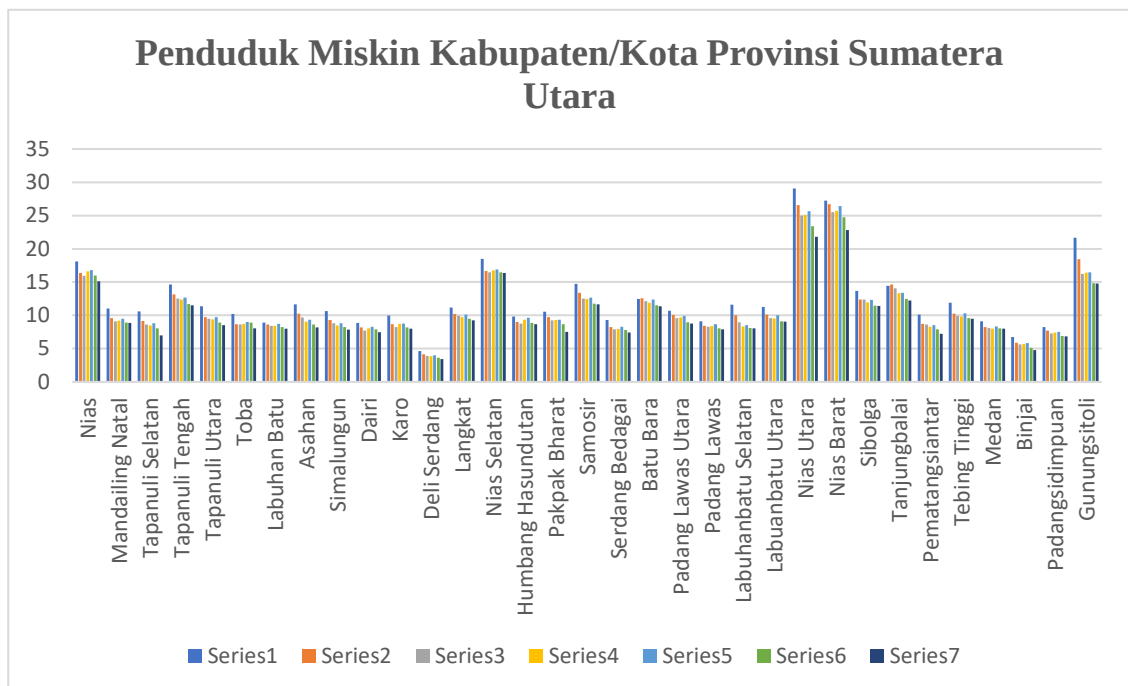
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat kita lihat pada grafik diatas, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) terdapat fenomena ketimpangan IPM yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya daerah Medan, Pematangsiantar dan Binjai, memiliki IPM yang tinggi (mendekati 80). Menurut teori HDI, IPM mendekati 80 termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan daerah Nias, Nias Selata dan Nias Barat berada dibawah rata-rata provinsi. Adanya perbedaan atau kesenjangan yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Utara belum merata, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun tingkat kesejahteraan ekonomi.

Di Provinsi Sumatera Utara, beberapa faktor utama yang memengaruhi IPM antara lain adalah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab utama rendahnya IPM adalah

kemiskinan, yang sering terjadi karena kurangnya keterampilan atau keahlian masyarakat, serta rendahnya keterampilan dan akses terhadap lapangan kerja formal yang menghambat produktifitas. Menurut Todaro & Smith, (2006) kemiskinan diketahui sebagai penyebab utama turunnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Setiap orang membutuhkan pendidikan dan layanan kesehatan sebagai kebutuhan pokok untuk bisa mengembangkan dirinya. Semakin baik kualitas dasar yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara, semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk maju dan berkembang.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2023 sangat mempengaruhi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah itu. Perubahan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah pula nilai IPM yang dicapai.



Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara
 Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS)

Dapat kita lihat pada grafik diatas, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) terdapat perbedaan atau keragaman yang besar terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten seperti Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan menunjukkan persentase penduduk miskin yang relatif tinggi. Sedangkan daerah perkotaan seperti Medan dan Binjai menunjukkan persentase penduduk miskin yang rendah. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan atau ketidakadilan terhadap social ekonomi antar wilayah. Menurut penelitian Penelitian lain oleh Simanjuntak, (2020) menemukan bahwa peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan berhubungan erat dengan rendahnya produktivitas sektor pertanian dan minimnya diversifikasi ekonomi daerah. Dapat kita ketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Kepulauan Nias masih menghadapi tantangan

keterisolasian geografis, infrastruktur terbatas, serta akses yang rendah terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan.

Salah satu alasan utama tingginya kemiskinan yang menurunkan IPM di Sumatera Utara adalah ketidakmerataan akses pendidikan antar daerah. Keluarga miskin di kabupaten/kota yang tertinggal sering tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Akibatnya, banyak anak putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Hal ini menyebabkan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang rendah di beberapa daerah. Penelitian dari Sukirno (2010), menyatakan bahwa kemiskinan menghalangi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena pendapatan yang rendah membuat orang tua tidak bisa menyekolahkan anak dengan baik.

Selain pendidikan, kemiskinan juga merusak kesehatan masyarakat. Orang miskin sulit mendapatkan layanan kesehatan, makanan sehat, dan rumah tinggal yang berkecukupan. Hasilnya, harapan hidup di daerah dengan kemiskinan tinggi lebih rendah. Sejalan dengan penelitian Todaro, (2000) menjelaskan bahwa kemiskinan yang tinggi menurunkan kualitas hidup karena orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, dan pengobatan. Kondisi ini membuat indeks kesehatan dalam IPM menjadi rendah.

Di sisi lain, struktur ekonomi yang masih bergantung pada pertanian tradisional dan pekerjaan informal menjadi penyebab besar kemiskinan di beberapa kabupaten Sumatera Utara. Masyarakat di pedesaan, seperti di

Mandailing Natal, Nias, dan Tapanuli Tengah, masih mengandalkan sektor primer dengan hasil yang rendah. Penelitian dari Kuncoro, (2018) menyatakan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan produktivitas kerja yang rendah; semakin miskinnya masyarakat, semakin sulitnya mereka berinvestasi di bidang pendidikan dan keterampilan, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022 juga memperparah kemiskinan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Banyak pekerja informal kehilangan pekerjaan, dan aktivitas ekonomi melambat drastis. Hal ini membuat kondisi rumah tangga miskin semakin buruk dan menurunkan IPM di beberapa kabupaten. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), (2023) meskipun angka kemiskinan turun setelah tahun 2022, efek pandemi terhadap pendidikan dan kesehatan masih terasa di daerah-daerah tertinggal.

Situasi ini mencerminkan apa yang disebut dari penelitian Nurkse, (1953) sebagai “lingkaran kemiskinan” (lingkaran setan kemiskinan), yaitu kondisi di mana pendapatan rendah menyebabkan investasi dan produktivitas rendah, yang pada akhirnya membuat pendapatan tetap rendah. Lingkaran ini jelas terlihat di kabupaten dengan IPM rendah di Sumatera Utara, di mana kemiskinan menjadi penghalang utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

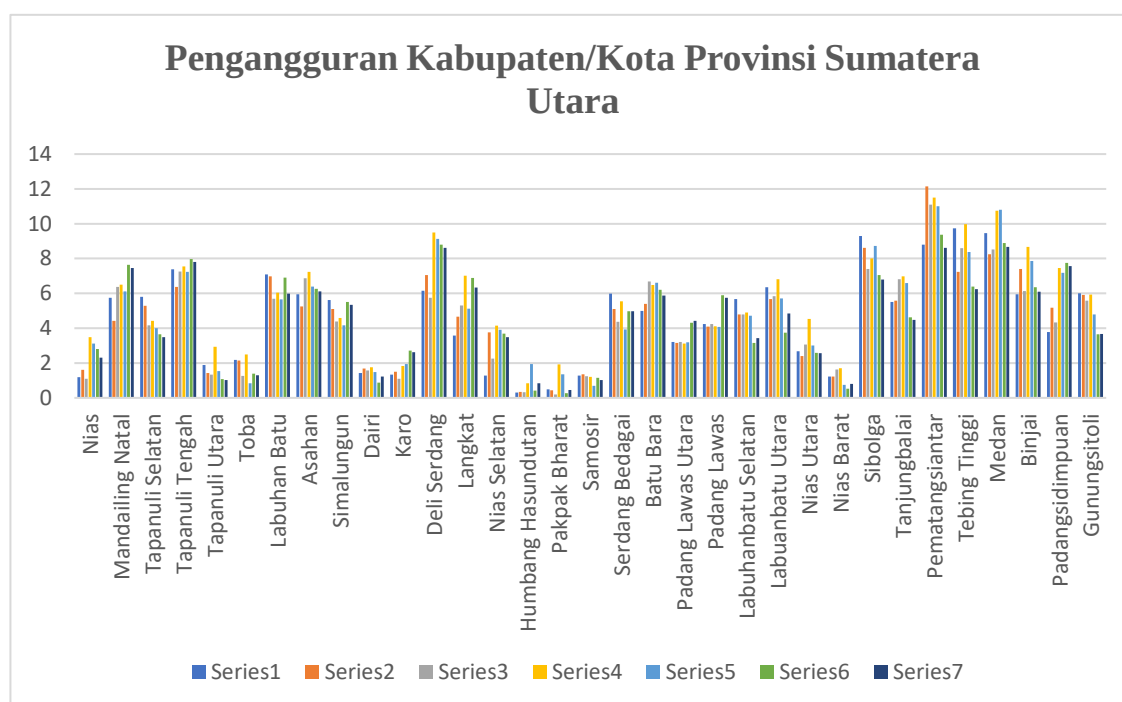
Laporan Pembangunan Manusia (UNDP) (2023), juga menyatakan bahwa kemiskinan multidimensi bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Oleh karena itu, cara mengatasi kemiskinan di Sumatera Utara tidak boleh hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Menurut teori pertumbuhan baru, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (M. Suliswanto, 2012). Pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dapat menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat mendorong peningkatan produktivitas, yang berdampak pada kinerja perekonomian (M. Suliswanto, 2012).

Kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebab kemiskinan biasanya muncul ketika masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan pun seringkali terabaikan (Mirza, 2012). Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan manusia antara keduanya semakin lebar, sehingga target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh pemerintah sulit untuk dicapai dengan baik.

Dalam menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan IPM, penting untuk dipahami bahwa pengangguran tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. TPT mencerminkan proporsi tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Ketika pengangguran tinggi, masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama, daya beli menurun, dan kemampuan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas dua komponen penting dalam perhitungan IPM (Astriani et al., 2021).



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara mencapai sekitar 5,84%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,45%.

Dimana dapat kita ketahui berdasarkan data (BPS), bahwa Daerah dengan aktivitas industri dan perdagangan tinggi seperti Medan, Binjai, dan Deli Serdang memiliki tingkat pengangguran yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk usia kerja yang tidak seluruhnya terserap oleh pasar tenaga kerja. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Nias, Nias Selatan, dan Mandailing Natal memiliki tingkat pengangguran lebih rendah, tetapi hal ini sering kali disebabkan oleh dominasi sektor informal dan pertanian subsisten yang tidak sepenuhnya produktif. Adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Misalnya, Kota Medan mencatat IPM sebesar 81,62 dengan tingkat pengangguran mencapai 7,1%, sementara Kabupaten Nias memiliki IPM hanya 66,25 meskipun tingkat penganggurannya relatif lebih rendah. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan struktur ekonomi dan kualitas tenaga kerja antarwilayah.

Dimana penelitian Pratama & Sari (2022), menyatakan bahwa ketika masyarakat kehilangan pekerjaan, pendapatan mereka menurun, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berkurang dan berdampak langsung pada penurunan IPM. Hal senada diungkapkan oleh penelitian Simanjuntak et al. (2021), yang menemukan bahwa kenaikan 1% tingkat pengangguran terbuka dapat menurunkan IPM sebesar 0,45 poin di wilayah Sumatera bagian utara.

Penelitian lain oleh Astriani et al. (2021), di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran menurunkan kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan dan mengakses layanan kesehatan yang

layak, sehingga berpengaruh negatif terhadap capaian IPM. Temuan ini diperkuat oleh Sutrisno dan Arifin (2024) yang mengkaji Provinsi Bali, di mana daerah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki IPM rendah akibat rendahnya kapasitas ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Putri et al. (2024), juga menemukan bahwa peningkatan TPT berdampak pada kenaikan angka kemiskinan yang pada akhirnya menurunkan IPM secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011), yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran tinggi menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, pengangguran bukan hanya cerminan kegagalan pasar tenaga kerja, tetapi juga faktor penghambat utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Selain memengaruhi aspek ekonomi dan sosial, pengangguran juga berdampak psikologis pada individu dan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Dalam penelitian Nasution & Lubis (2020), menegaskan bahwa tingginya pengangguran menghambat partisipasi pendidikan dan memperburuk kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Sementara itu, penelitian Tarigan (2021), menemukan bahwa meningkatnya pengangguran di wilayah pedesaan mendorong urbanisasi ke kota-kota besar, yang memperlebar kesenjangan antarwilayah di Sumatera Utara.

Berbagai penelitian menawarkan solusi untuk menekan angka pengangguran dan memperbaiki IPM. Di sisi lain, Sitorus et al. (2022), menekankan peran ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM dalam memperluas

lapangan kerja produktif, terutama di daerah dengan infrastruktur ekonomi terbatas.

Oleh karena itu, menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif, berkelanjutan, serta inklusif terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, pengurangan pengangguran tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia di setiap kabupaten dan kota.

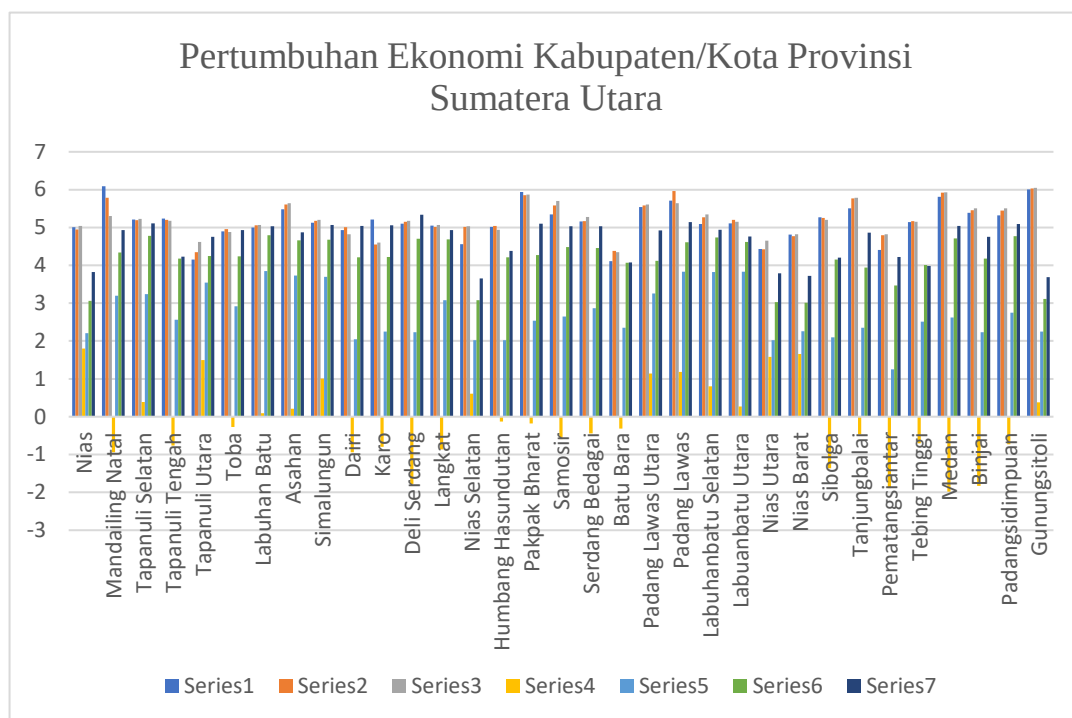
Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith, (2011) bahwa ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, yang diperparah oleh tingginya pengangguran, mengakibatkan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengangguran tidak hanya dilihat sebagai kegagalan pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai faktor penghambat utama dalam pembangunan manusia.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menggambarkan kemajuan suatu daerah karena mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita, memperluas lapangan kerja, serta memungkinkan pemerintah memperbesar investasi di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, dalam

kenyataannya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak selalu berjalan seiring. Di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan IPM karena pertumbuhan yang terjadi tidak merata dan cenderung tidak inklusif. Pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan regional.

Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2017–2023 menunjukkan dinamika yang cukup variatif. Secara umum, perekonomian daerah mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2020 (akibat pandemi), kemudian mulai menunjukkan pemulihan pada periode 2021–2023. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2025) yaitu bahwa mereka mencatat Indonesia secara umum hampir separuh provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan yang meningkat antara 2017–

2023. Dengan demikian, pola yang muncul di Sumatera Utara yakni fluktuasi, perlambatan, kemudian pemulihan sejajar dengan temuan nasional.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi antar kabupaten kota mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Salah satunya Kabupaten/kota seperti Medan, Deli Serdang, dan Binjai, umumnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Sebaliknya, daerah seperti Nias, Nias Selatan, dan Mandailing Natal, masih menghadapi laju

pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, serta ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan tradisional.

Tahun 2020 menjadi titik balik di banyak wilayah. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan yang jauh di bawah rata-rata atau bahkan negatif. Contoh, Kota Medan mencatat -1,98 %, Kabupaten Deli Serdang -1,78 % (data internal). Kondisi tersebut menggambarkan kerentanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal seperti pandemi. Penelitian oleh Ghuzini, (2022) menunjukkan bahwa di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) ketimpangan pendidikan dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya, ketimpangan pendapatan justru memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah 3T. Hal ini menandakan bahwa meski pertumbuhan bisa terjadi, namun pemerataan masih menjadi persoalan.

Memasuki 2021 hingga 2023, hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan positif kembali. Sebagai contoh, Kota Medan yang sempat negatif tumbuh kembali ke kisaran 3-5 % pada 2023. Perbaikan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, perbaikan aktivitas sektor jasa dan perdagangan, serta stimulasi lokal. Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan tidak menjamin pemerataan; justru bisa memperlebar gap jika tidak dibarengi kebijakan inklusif.

Meski pemulihan dapat dilihat, terdapat disparitas yang jelas antar wilayah. Beberapa kabupaten/kota seperti Tapanuli Selatan, Padang Lawas,

Deli Serdang mencatat pertumbuhan $> 5\%$ pada 2023, sedangkan wilayah seperti Nias Selatan ($-3,65\%$) dan Gunungsitoli ($-3,69\%$) masih relatif rendah. Penelitian yang mengeksplorasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia menyimpulkan bahwa faktor-faktor struktural seperti akses infrastruktur, keberagaman ekonomi, dan lokasi geografis sangat mempengaruhi disparitas tersebut (Uken Sutisna et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah urban atau dengan akses baik memperoleh manfaat lebih besar dari pemulihan ekonomi dibanding wilayah terpencil atau kepulauan.

Penelitian yang dilakukan oleh Garibaldi (2019), menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara bersifat jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Hal serupa ditemukan oleh Simanjuntak (2020), yang mengungkapkan bahwa ketimpangan wilayah di Sumatera Utara tergolong tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) belum diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan manusia.

Menurut Prasetyoningrum & Sukmawati (2016), menyatakan pertumbuhan ekonomi memang dapat meningkatkan IPM karena pendapatan masyarakat yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, efek positif ini hanya dapat terjadi apabila kebijakan redistribusi pendapatan dan pembangunan infrastruktur

sosial dijalankan secara efektif. Sebaliknya, pada wilayah dengan kesenjangan sosial yang tinggi, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Temuan ini memperkuat konsep *growth without development*, yaitu situasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Baihaqi & Puspitasari (2020), menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan tingkat pengangguran dan secara tidak langsung meningkatkan IPM. Namun, apabila pertumbuhan tersebut hanya didorong oleh sektor-sektor padat modal yang minim serapan tenaga kerja, maka dampaknya terhadap peningkatan IPM akan sangat terbatas. Penelitian dari Hidayah (2022), juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap IPM apabila peningkatan ekonomi tidak diiringi dengan perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Temuan Sitorus (2021), menyatakan bahwa di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa pada tahun 2020, ketika PDRB mengalami penurunan sebesar -1,78 persen, nilai IPM justru meningkat dari 75,43 menjadi 75,44. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia masih dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, selama sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan tetap berkembang. Dengan kata lain, peningkatan IPM tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi

pada kemampuan pemerintah dalam memastikan pemerataan hasil pembangunan.

Secara umum, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika pembangunan yang cukup kompleks dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda antar kabupaten dan kota. Variasi tersebut terlihat dari perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pengangguran, serta laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Beberapa wilayah seperti Kota Medan, Binjai, dan Pematangsiantar memiliki IPM yang tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, sementara daerah seperti Nias, Nias Barat, dan Mandailing Natal masih menghadapi berbagai kendala dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perbedaan ini mencerminkan bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara belum berlangsung secara merata dan masih memerlukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Di antara seluruh daerah di provinsi tersebut, Kota Medan menjadi wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, Kota Medan memainkan peranan penting dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang relatif tinggi menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain, masih terdapat tantangan pembangunan berupa tingginya tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan sosial antarwilayah di dalam kota.

Berdasarkan data menunjukkan adanya kondisi paradoks pembangunan. Dimana ketika peningkatan aktivitas ekonomi dan capaian IPM yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pembangunan manusia di Kota Medan untuk memahami dinamika pembangunan perkotaan secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang kompleks dengan IPM. Tingginya angka pengangguran dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu pendidikan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Kota Medan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan IPM secara

berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Negara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyebarkan hasil pembangunan secara merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia sangat penting agar kebijakan pembangunan bisa lebih adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
2. Sejauh mana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
3. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?
4. Sejauh mana Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan keadilan, yang dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran serta kurangnya pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Peneliti

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
- b. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang factor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017–2023 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Analisis data panel dengan Fixed Effect Model memperlihatkan bahwa variabel tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap IPM dengan karakteristik yang berbeda.

Pertama, tingkat kemiskinan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi angka kemiskinan, semakin rendah pula kualitas pembangunan manusia. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, upaya penurunan angka kemiskinan menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kedua, tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka bukanlah faktor utama yang menentukan pembangunan manusia di Sumatera Utara. Fenomena ini terjadi karena pengangguran lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang justru memiliki IPM tinggi, sehingga pengaruh pengangguran terhadap kualitas hidup tidak terlalu nyata.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi justru ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor atau daerah tertentu menyebabkan ketimpangan, sehingga hasil pembangunan tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan IPM. Dengan kata lain, efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi tidak berjalan efektif.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM, di mana sekitar 69,4% variasi IPM di Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia perlu dirancang dengan memperhatikan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Kesimpulannya, pembangunan manusia di Sumatera Utara dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi hambatan terbesar, pengangguran berpengaruh terbatas, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru menahan peningkatan IPM. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan agar peningkatan IPM dapat dirasakan secara menyeluruh di seluruh wilayah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti belanja pemerintah, kualitas infrastruktur, investasi pendidikan dan kesehatan, maupun faktor lingkungan. Dengan cakupan variabel yang lebih luas dan penggunaan metode analisis yang berbeda, penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih mendalam.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Dukungan publik terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan akan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah, sehingga upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara dapat berjalan lebih optimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. S. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- (UNDP). (1990). *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. Oxford University Press.
<https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990>
- (UNDP), U. N. D. P. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World*. UNDP.
- Alkire, S. U. (2019). *UNDP*. 1–23.
- Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Amelinda, D. V., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Kabupaten Tulungagung. *Independent: Journal of Economics*, 2(1), 159–174.
<https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.45463>
- Apriyanti, M., & Rospida, L. (2025). *DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA 2014-2023 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 8(2), 439–455.
- Astriani, L., Wibowo, D., & Rahayu, F. (2021). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(2), 45–56.
- Baihaqi, A. B., & Puspitasari, P. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>
- Baihaqi, A., & Puspitasari, D. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 45–58.
- Barro, R. J. (2013). *Economic Growth and Human Development*. [Penerbit, ganti dengan penerbit yang benar].
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Rajawali Press.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- BPS. (2024). *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 2024*. Badan Pusat Statistik (BPS).

- Chakrabarti, A., & Dhar, A. (2017). Economic Development. In *Routledge Handbook of Marxian Economics*. <https://doi.org/10.4324/9781315774206-29>
- Chandra, K. (2022). [JUDUL TIDAK DIKETAHUI — GANTI DENGAN JUDUL ARTIKEL/BUKU]. [NAMA JURNAL/PELAPORAN].
- Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). *Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health*. Institute for Futures Studies.
- David, W., & Djamaris, A. (2018). *Metode Statistik untuk Ilmu dan Teknologi Pangan*. Universitas Bakrie Press.
[https://repository.bakrie.ac.id/1255/1/Metode Statistik final.pdf](https://repository.bakrie.ac.id/1255/1/Metode%20Statistik%20final.pdf)
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labour in Society*. Free Press.
- Ellitan, (2009). (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38775/uu-no-52-tahun-2009>
- Garibaldi, M. (2019a). Analisis Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi / Neliti*.
<https://media.neliti.com/media/publications/14820-ID-analisis-hubungan-ipm-dan-pertumbuhan-ekonomi-kabupatenkota-di-provinsi-sumatera.pdf>
- Garibaldi, M. (2019b). *Regional Growth Dynamics and Human Development: The Concept of Growth Lagging Regions*. Routledge.
- Ghuzini. (2022). Ketimpangan pendidikan dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 139.
<https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th Edition (ed.)). McGraw-Hill.
- Hasby, H., Sufyani, H. S., Murad, A. A., & Raraga, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(1), 112–118.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jemsi/article/view/6069>
- HDI. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. UNDP. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>
- Hidayah, N. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia* [UIN Raden Intan Lampung (Skripsi)].
[https://repository.radenintan.ac.id/21838/1/SKRIPSI PERPUSTAKAAN.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/21838/1/SKRIPSI%20PERPUSTAKAAN.pdf)

- Hidayat, S. &. (2021). Dampak Pengangguran terhadap Pembangunan Manusia: Studi di [Lokasi]. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(2), 123–140.
- Idris, Z. I., Mu'jizat, P., & Husain, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ecogen*.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1536883640934252912>
- Keynes. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Manihuruk, F. E., & Suharianto, J. (2024). Analisis Pengaruh IPM, TPT, dan UMR Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dengan Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
https://www.researchgate.net/publication/390250144_ANALISIS_PENGARUH_IPM_TPT_DAN_UMR_TERHADAP_JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN_DI_INDONESIA_DENGAN_MENGGUNAKAN_REGRESI_DATA_PANEL
- Michael P. Todaro, S. C. S. (2003). *ekonomi pembangunan jilid I edisi kesembilan*.
https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 2–15.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/474>
- Nababan, T. S., Panjaitan, R., Panjaitan, F., & Napitupulu, S. (2024). Investigating the Relationship Between Economic Growth and Human Development Index: Are They Simultaneously Related? *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 12(2), 319–330.
<https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist>
- Nasution, H., & Lubis, A. (2020). Pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 25–34.
- Nurkse. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Basil Blackwell.
- Paul, R. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2016). Analisis Pengaruh

- Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.57>
- Pratama, A., & Sari, D. (2022). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 14(2), 45–56.
- Putri, A., Syafrudin, R., & Dewi, K. (2024). Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan dampaknya terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 10(1), 12–26.
- Reva. (2023). ANALYSIS OF THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH , PERCENTAGE OF POOR PEOPLE , AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN EAST. 12(04), 2368–2374.
- Robert, L. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Rostow. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- Sadikin, A., & Rusmasari, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 30–41. <https://doi.org/10.53990/djep.v3i1.207>
- Sari. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 220–226. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art12>
- Schultz. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Simanjuntak, J. (2020). *Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota dan Hubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010–2019*. Digilib UNIMED (Repository). <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/41507/>
- Simanjuntak, J., Manurung, M., & Hutagalung, S. (2021). Analisis hubungan pengangguran dan IPM di wilayah Sumatera bagian utara. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 9(3), 133–145.
- Siska, M. (2020). *Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatra Utara*. 1–126.
- Sitorus. (2021). Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*.

<https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/31>

- Sitorus, B., Tampubolon, A., & Situmeang, D. (2022). Peran ekonomi kreatif terhadap pengurangan pengangguran di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi Dan Inovasi*, 8(1), 22–35.
- Sitorus, R. A. (2021). Kapasitas Fiskal Daerah dan Kinerja Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Regional*, 9(1), 12–25.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, M. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. *Ub Malang*, 3, 3.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3610>
- Syofya, H. (2016). Jurnal Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), hal 88-104.
- Tarigan, P. (2021). Dampak pengangguran terhadap mobilitas penduduk dan ketimpangan wilayah di Sumatera Utara. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 5(3), 56–68.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education Limited.
- Todaro, & Smith. (2020). *Economic Development* (13th Edition (ed.)). Pearson.
- Uken Sutisna, Rayhan Anwarul Umam, & Buci Morisson. (2025). Pusat dan Periphery: Memahami Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 1131–1144.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6026>
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1990>
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. UNDP. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>